

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah disampaikan, maka akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2020 dapat dilakukan analisis terhadap capaian kerjanya. Di dalam menganalisis hal tersebut tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan akan disandingkan dengan rencana kegiatan yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam pengukuran kinerja yang telah diuraikan, ada beberapa capaian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja masih belum sesuai dengan perencanaan awal. Namun, ada beberapa kegiatan yang jauh melampauinya. Sebagaimana diketahui, jumlah kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan (RKA) merupakan angka yang diperkirakan ketika penyusunan dengan mengestimasi tingginya intensitas politik nasional. Estimasi tingginya jumlah kegiatan dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kemungkinan kegiatan Pimpinan DPR RI pada tahun 2018.

Pada perjalanannya, Biro Kesekretariatan Pimpinan juga telah melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk mengakomodasi tingginya kegiatan yang dilakukan Pimpinan DPR. Dengan demikian, kinerja yang disajikan adalah perbandingan antara realisasi dengan rencana kegiatan yang telah direvisi.

Beberapa capaian pelaksanaan kegiatan yang melampaui dari perencanaan adalah pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPR RI dan kegiatan kunjungan kerja dalam negeri Pimpinan DPR RI.

Tabel
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Pimpinan DPR RI

NO	JENIS RAPAT	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat Bamus/Konsultasi Pengganti Bamus	40	20	50
2.	Rapat Pimpinan	10	25	250
2.	Rapat/Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi	33	43	130

Tabel

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Negeri Pimpinan DPR RI

NO	PIMPINAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Ketua DPR RI	15	70	466,67%
2.	Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	34	121	355,88%
3.	Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	12	26	216,67%
4.	Wakil Ketua DPR RI/Korekku	87	119	136,78%
5.	Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	62	80	129,03%
6.	Wakil Ketua DPR RI/Korakerhal	11	24	218,18%

Tabel 35
Realisasi kegiatan dan realisasi anggaran
Kegiatan Kunjungan Dalam Negeri Pimpinan

KEGIATAN			ANGGARAN		
RENCANA PADA PAGU REVISI	REALISASI SETELAH REVISI	%	PAGU AKHIR REVISI	REALISASI	%
Ketua DPR RI					
Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam					
Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang					
Wakil Ketua DPR RI/ Korekku					
Wakil Ketua DPR RI/ Korkesra					

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan perbandingan capaian realisasi kegiatan dan capaian realisasi anggaran kunjungan kerja dalam negeri pada diagram di bawah ini.

Realisasi kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPR RI dan kegiatan kunjungan kerja dalam negeri Pimpinan DPR RI yang melampaui angka perencanaan awal telah

difasilitasi oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan melalui beberapa kali revisi anggaran untuk mengakomodasi tingginya dinamika kegiatan Pimpinan pada tahun 2018. Di bawah ini adalah kinerja realisasi kegiatan kunjungan dalam negeri Pimpinan DPR RI dan realisasi anggaran kunjungan kerja dalam negeri Pimpinan dibandingkan dengan rencana awal dan pagu pada awal tahun 2018.

Selanjutnya, mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai sistem pendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maka penggunaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel

Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 dan realisasinya

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Pagu Awal) Rp.	ANGGARAN (revisi akhir) Rp.	Realisasi Rp.
SATKER DEWAN				
1.	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI: ❖ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	13.251.047.000	16.990.163.000	5.056.930.426
2.	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI ❖ Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI	83.582.924.000	73.854.712.000	48.908.380.503
SATKER SETJEN				
1.	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI ❖ Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	7.437.860.000	3.802.659.000	3.643.095.990

Tabel37

Capaian Realisasi Anggaran Program Penguatan Kelembagaan DPR RI (Satker Dewan)

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2019		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI						
1.	Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI					
	Rp. 20.610.890.000	Rp. 15.768.561.826	76,51	Rp. 9.867.648.000	Rp. 6.846.622.509	69,38
2.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	Rp. 17.876.107.000	Rp. 17.346.085.350	97,04	Rp.14.835.584.000	Rp. 13.817.675.210	93,14
3.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	Rp. 21.094.610.000	Rp. 20.669.279.100	97,98	Rp. 10.593.223.000	Rp. 9.860.236.625	93,08
4.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	Rp. 4.500.601.000	Rp. 966.542.600	21,48	Rp. 8.493.129.000	Rp. 6.982.784.500	92,24
5.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	Rp. 21.370.384.000	Rp. 20.685.027.541	96,79	Rp. 10.192.561.000	Rp. 9.161765.159	89,89
6	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Hubungan Antar Lembaga					
	Rp. 11.756.181.000	Rp. 11.755.208.360	99,99	-	-	-
7	Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					
	Rp. 1.551.500.000	Rp. 826.075.000	53,24	Rp. 576.500.000	Rp. 531.765.000	92,24
8	Pelaksanaan Tugas Musyawarah Pimpinan					
	Rp. 1.930.800.000	Rp. 1.689.869.700	87,52	Rp. 630.800.000	Rp. 562.246.900	89,13
9.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan Lainnya					
	Rp. 3.288.967.000	Rp. 2.102.158.500	63,92	Rp. 1.675.276.000	Rp. 1.135.844.600	67,80
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI						
1.	Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua					
	Rp. 3.655.508.000	960.194.400	26,27	Rp. 2.476.551.000	Rp. 1.456.073.050	58,79
2.	Tim Penguatan Diplomasi Parlemen					

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2019		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
	Rp. 209.370.000	Rp. 0	0	Rp. 296.760.000	77.600.000	26,15
3.	Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)					
	Rp. 185.840.000	Rp. 0	0	296.760.000	Rp. 0	0
4.	Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan					
	Rp. 2.180.595.000	Rp. 0	0	Rp. 2.213.344.000	Rp. 1.252.494.376	56,59
5.	Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia					
	Rp. 5.823.727.000	Rp. 4.387.281.300	75,33	4.262.565.000	1.138.362.000	26,71
6.	Tim Implementasi Reformasi DPR RI					
	Rp. 6.481.443.000	Rp. 5.724.717.000	88,32	Rp. 438.480.000	Rp. 118.600.000	27,05
7.	Tim Pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional					
	-	-	-	Rp. 1.376.366.000	0	0
8.	Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana					
	Rp. 2.430.177.000	Rp. 1.622.974.000	66,78	2.915.477.000	Rp. 818.633.000	28,08
9.	Tim Pengawas Penegakan Hukum					
	-	-	-	Rp. 1.376.366.000	0	0
10.	Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji					
	Rp. 8.935.570.000	Rp. 7.030.508.400	78,68	-	-	-

Hal terpenting terkait dengan serapan anggaran adalah rencana anggaran pada DIPA 2020 dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya, ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan DPR RI. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI.

Tabel

Capaian Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya
Sekretariat Jenderal DPR RI (Satker Setjen)

N O	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2019		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
Fasilitas Kesekretariatan Pimpinan						
1.	Perumusan Bahan Kebijakan Biro Kesekretariatan Pimpinan					
	1.167.987.000	1.000.477.200	86	1.272.916.000	1.235.672.900	97,07
2.	Fasilitas Persidangan Ketua					
	91.080.000	66.240.000	73	0	0	
3.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	37.400.000	3.400.000	9	0	0	
4.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	84.151.000	40.690.000	48	8.280.000	8.280.000	100
5.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	20.360.000	20.000.000	98	0	0	
6.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	8.842.000	4.140.000	98	0	0	
7.	Fasilitas Persidangan Badan Musyawarah					
	350.556.000	325.620.000	93	100.260.000	93.562.000	93,32
8.	Fasilitas Persidangan Musyawarah Pimpinan					
	308.610.000	273.290.000	89	53.462.000	35.964.087	67,27
9.	Perumusan Bahan Kebijakan Pimpinan Sekretariat Jenderal					
	4.202.156.000	3.632.578.632	86	1.331.560.000	1.245.546.400	93,54
10.	Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR					
	1.567.298.000	1.488.870.875	95	1.036.191.000	1.024.070.690	98,83

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran berbasis kinerja

sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepatutan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan *input* atas *output*, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan *outcome* atas *output*.

Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat akan memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya, ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan DPR RI. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI. Dan sebaliknya ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.

Oleh sebab itu dengan perencanaan anggaran yang matang akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai program/kegiatan Pimpinan Dewan, dan semakin meningkatkan akurasi perencanaan anggaran yang berdampak semakin baik kualitas serapan anggaran yang proporsional. Selain itu, pelaksanaan perencanaan anggaran juga atas arahan dan kebijakan Pimpinan DPR RI.